

MODEL PENDIDIKAN BERBASIS KOMUNITAS (Sebuah Konsep Pendidikan Alternatif)

Maidar Darwis¹

Email: maidar77darwis@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Dipublikasi Januari 2016

Abstrak

Fenomena mahalannya biaya pendidikan misalnya, merupakan fakta yang tak terbantahkan. Pendidikan saat ini tak lebih dari “barang mewah” yang hanya diperuntukkan bagi kaum *borjuis* alias berduit, sedangkan kaum miskin hanya menunggu keberuntungan untuk dapat merasakan nikmatnya pendidikan. Selama ini stigma yang terbangun di masyarakat, bahwa pendidikan yang berkualitas selalu identik dengan tingginya biaya, semakin berkualitas semakin biaya yang harus dibayar. Untuk dapat menerapkan konsep pendidikan berbasis masyarakat di sebuah kampus, tentu saja, perlu diketahui prinsip-prinsipnya, di antaranya: pembebasan, keberpihakan, partisipasi, kurikulum berbasis kebutuhan, evaluasi berpusat pada subyek didik dan percaya diri. Pandangan inilah yang dicoba dihilangkan bahwa untuk membangun konsep pendidikan semacam ini tidaklah mesti meninggalkan kearifan lokal. Sudah saatnya kaidah-kaidah lokal diberdayakan, diolah dan dimanfaatkan melalui dunia pendidikan. Paling tidak, pendidikan semacam ini bisa dijadikan sebagai alternatif pendidikan dalam memberdayakan masyarakat lokal, khususnya di STAI Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh.

Kata Kunci : *Pendidikan, Komunitas dan Alternatif*

p-ISSN 2442-725X • e-2621-7201

Alamat Korespondensi:

Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,
Email: jurnal.staitapaktuan@gmail.com

¹Maidar Darwis, M.Ag, merupakan Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Saat ini, menjadi dosen diperbantukan (DPK) ke Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tapaktuan semenjak tahun 2012. Saat ini, menjabat sebagai Ketua STAI Tapaktuan Aceh Selatan.

PENDAHULUAN

Pendidikan yang selama ini dijalankan melalui proses pembelajaran ternyata belum mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, di antaranya mahal biaya pendidikan misalnya, merupakan fakta yang tak terbantahkan. Pendidikan saat ini tak lebih dari “barang mewah” yang hanya diperuntukkan bagi kaum borjuis alias berduit, sedangkan kaum miskin hanya menunggu keberuntungan untuk dapat merasakan nikmatnya pendidikan.

Mahalnya biaya pendidikan di berbagai sekolah mulai dari tingkat dasar sampai ke Perguruan Tinggi, seakan menjadi kata kunci dalam tubuhnya lembaga-lembaga pendidikan formal. Kampus sebagai pewanjantahan pendidikan tinggi misalnya, akan bersahabat jika kita punya uang, dan ia akan menjauh ketika kita tidak punya uang. Dengan dalih mutu, kampus berlomba-lomba menaikkan biaya pendidikannya dan mengekplotasi mahasiswa secara besar-besaran, terkadang tanpa peduli terhadap kualitas pendidikan itu sendiri. Mutu pendidikan pun seakan identik dengan tingginya biaya kuliah. Semakin bermutu pendidikan yang ditawarkan, semakin tinggi pula biaya yang harus dibayar. Dampaknya, banyak dari mahasiswa/ masyarakat miskin tak mampu menguliahkan anaknya karena terbentur biaya.

Di sisi lain, proses pendidikan yang hanya menempatkan mahasiswa dan dosen sebagai pusat pendidikan membuat masyarakat dan lingkungan sekitarnya menjadi termarginalkan. Kampus seakan tidak peduli dengan permasalahan-permasalahan yang tengah menghimpit masyarakat. Dengan kata lain, dunia kampus dianggap dunia yang “hebat” bagi sebagian masyarakat, namun terkadang kurang bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Padahal, kampus punya tanggung jawab moral terhadap pengabdianannya pada masyarakat sekitar. Misalnya, penerapan teknologi tepat guna untuk mengolah berbagai kotoran hewan ternak yang ada di lingkungan sekitar menjadi energi biogas. Hal ini menunjukkan bahwa perkuliahan di kampus bukan untuk mengejar “nilai” atau “IP/IPK” semata, tapi langsung mengatasi problem riil yang terjadi di lingkungan

masyarakat sekitar. Karena itu, mahasiswa perlu diperkenalkan konsep berbasis pendidikan komunitas (*community-based education*), sehingga mahasiswa akan lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya.

Tujuan tulisan ini diharapkan akan bisa dijadikan inspirasi bagi kita semua untuk membangun sebuah paradigma terhadap “kampus harapan,” yang notabene kampus tersebut mampu mengakomodir kepentingan mahasiswa miskin dan termarjinalkan secara ekonomi, peduli terhadap masyarakat sekitar serta dapat memanfaatkan potensi-potensi lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

KAJIAN KONSEPTUAL

Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat

1. Pendidikan berbasis masyarakat

Pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*) merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan umur hidup. Kemunculan paradigma pendidikan berbasis masyarakat dipicu oleh arus besar modernisasi yang menghendaki terciptanya demokratisasi dalam segala dimensi kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Konsekuensinya, pendidikan harus dikelola secara desentralisasi dengan memberikan tempat seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat.²

Dalam konteks ini, Danim memandang bahwa konsep pendidikan berbasis masyarakat merupakan salah satu solusi alternatif untuk memecahkan problem pendidikan. Keterpurukan cara-cara lama dalam mengelola pendidikan yang lebih sangat sentralistik mendorong perubahan cara pandang ke arah sebaliknya, yaitu pemberian otonomi kampus-masyarakat untuk mengelola pendidikan dengan memperhatikan aspirasi serta kondisi yang terjadi di masyarakat.³ Sebagai implikasinya, menurut Zubaili, bahwa pendidikan menjadi usaha bersama yang melibatkan partisipasi

²Lihat, Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, (Yogyakarta: Safaria Insania Press, 2004), hal. 86.

³Sudarman Danim, *Visi Baru Manajemen Kampus*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 4-5.

masyarakat di dalamnya. Partisipasi pada konteks ini berupa kerja sama antara warga dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, menjaga dan mengembangkan aktifitas pendidikan. Sebagai sebuah kerjasama, maka masyarakat diasumsikan mempunyai aspirasi yang harus diakomodasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu program pendidikan.⁴

Secara konseptual, istilah pendidikan berbasis masyarakat atau yang biasa disebut (*community-based education*) merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.”⁵ Pendidikan dari masyarakat artinya masyarakat ditempatkan sebagai subyek/ pelaku pendidikan, bukan obyek pendidikan. Dalam konteks ini, masyarakat dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam setiap program pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan untuk masyarakat adalah masyarakat dilibatkan dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka. Dengan kata lain, masyarakat perlu diberdayakan, diberi peluang dan kebebasan untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara spesifik di dalam, untuk dan oleh masyarakat sendiri.

Sedangkan Smith sebagaimana yang dikutip oleh Zubaidi, mengatakan bahwa pendidikan berbasis masyarakat adalah sebuah proses yang didesain untuk memperkaya kehidupan individual dan kelompok dengan mengikutsertakan orang-orang dalam wilayah geografi, atau berbagai kepentingan umum, untuk mengembangkan dengan suka rela tempat pendidikan, tindakan, dan kesempatan refleksi yang ditentukan oleh pribadi, sosial, ekonomi, dan kebutuhan politik mereka.⁶ Dengan demikian, esensi dari pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya merupakan program pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat untuk

menggali potensi dan kekuatan yang mereka miliki. Dalam konteks inilah, masyarakat merupakan agen yang mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Dalam konteks keindonesiaan, model pendidikan berbasis masyarakat saat ini telah diakui keberadaannya. Hal itu tertuang dalam dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pada pasal 26 ayat 1-7. Hanya saja Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional, tidak menggunakan istilah pendidikan berbasis masyarakat, akan tetapi menggunakan istilah pendidikan non formal.⁷ Jadi, esensi undang-undang tersebut disebutkan bahwa pendidikan non-formal diselenggarakan oleh warga yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Dalam perkembangannya, kemunculan pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia pada dasarnya, tidak hanya untuk menambah atau melengkapi materi pendidikan formal. Akan tetapi, lebih didasarkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sebab, keberadaan pendidikan formal bagi sebagian kalangan dirasakan semakin menjauh dari realitas masyarakat yang sebenarnya. Pendidikan telah mengabaikan potensi-potensi lokal dengan kurikulum-kurikulumnya, yang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Padahal, seharusnya pendidikan dijadikan sebagai “alat” untuk memberdayakan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, keberadaan pendidikan formal (kampus: *read*)) sejatinya dapat dijadikan sebagai pusat pembaharuan sosial bagi masyarakat setempat dan pemberdayaan potensi-potensi lokalitas setempat. Jika hal ini bisa terealisasi bukan tidak mungkin, pendidikan di negeri ini akan syarat dengan nilai.

2. Prinsip pendidikan berbasis masyarakat
Dari uraian di atas, ada dua hal penting dari konsep pendidikan berbasis masyarakat. *Pertama*, perlu adanya wacana

⁴Zubaedi., *Pendidikan Berbasis Masyarakat; Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 130-131.

⁵*Ibid*, hal. 132.

⁶*Ibid*, hal. 134.

⁷*Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Penjelasannya*, (Yogyakarta: Media Wacana Press), hal. 20.

membangun “Kampus Harapan” yang pada hakikatnya merupakan bentuk perlawanan terhadap komersialisasi pendidikan yang semakin merajalela di daerah ini. *Kedua*, kampus ini ingin keluar dari sistem *legal-formalistik* yang membelenggu masyarakat dalam proses berpendidikan. Kampus dianggap terlalu mengejar ijazah, ketimbang pengembangan dan pemberdayaan potensi mahasiswanya.

Untuk dapat menerapkan konsep pendidikan berbasis masyarakat di sebuah kampus, tentu saja, perlu diketahui prinsip-prinsipnya, di antaranya:

a. Pembebasan

Konsep pendidikan berbasis masyarakat menekankan pada prinsip pembebasan untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Membebaskan berarti keluar dari belenggu *legal-formalistik* yang selama ini menjadikan pendidikan tidak kritis dan kreatif. Sebab, pada dasarnya manusia memiliki kebebasan dalam memilih dan berbuat. Kebebasan dalam menentukan, memilih dan mengembangkan potensi merupakan fitrah manusia.

Meminjam istilah Freire, bahwa fitrah manusia sejati adalah menjadi pelaku atau *subyek*, bukan penderita atau *obyek*. Panggilan manusia sejati adalah menjadi *pelaku yang sadar*, yang bertindak mengatasi dunia serta realitas yang menindas atau yang mungkin menindasnya. Dunia dan realitas atau realitas dunia ini bukan “sesuatu yang ada dengan sendirinya,” dan karena itu “harus diterima menurut apa adanya” sebagai suatu takdir atau semacam nasib yang tak terelakkan, semacam mitos. Manusia harus menggeluti dunia dan realitas dengan penuh sikap kritis dan daya cipta, dan hal itu berarti atau mengandaikan perlunya sikap orientatif yang merupakan pengembangan bahasa pikiran (*thought of language*), yakni bahwa pada hakikatnya manusia mampu memahami keberadaan dirinya dan lingkungan dunianya yang dengan bekal pikiran dan tindakannya ia mengubah dunia dan realitas. Karena itulah manusia berbeda dengan binatang yang hanya digerakkan oleh naluri. Manusia juga memiliki naluri, tapi juga memiliki kesadaran (*consciousness*). Manusia memiliki kepribadian dan eksistensinya. Ini tidak berarti manusia tidak memiliki keterbatasan, tetapi dengan fitrah kemanusiaannya

seseorang harus mampu mengatasi situasi-situasi batas yang mengekanginya. Jika, seseorang menyerah atau pasrah pada situasi batas itu, apalagi tanpa ikhtiar dan kesadaran sama sekali, maka sesungguhnya ia tidak manusiawi lagi. Seseorang yang manusiawi harus menjadi pencipta (*the creator*) sejarah sendiri, karena seseorang hidup di dunia dengan orang-orang lain sebagai umat manusia. Dengan demikian, proses pendidikan yang mengabaikan potensi manusia adalah tidak manusia

(*dehumanisasi*) - meminjam istilahnya Friere.

b. Keberpihakan

Prinsip ini adalah bentuk kritik terhadap sistem pendidikan yang dibangun oleh pihak penguasa (pemerintah) yang kurang berpihak pada masyarakat miskin. Sering kali program-program pendidikan yang dirancang oleh pemerintah kurang keberpihakannya pada masyarakat miskin. Meskipun secara retorika politik, program tersebut disusun di atas derita masyarakat yang terabaikan, tetapi tidak pernah disentuh. Karena itu, pendidikan ke depan, perlu adanya keberpihakan pada masyarakat miskin yang selama ini terabaikan haknya dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan memang harus menjadi proses pemerdekaan yang bertujuan menggarap realitas manusia, dan karena itu, *secara metodologis bertumpu di atas prinsip-prinsip aksi dan refleksi total*, yakni prinsip bertindak untuk mengubah kenyataan yang menindas dan pada sisi simultan lainnya secara terus-menerus menumbuhkan kesadaran akan realitas dan hasrat untuk mengubah kenyataan yang menindas itu.

Keberpihakan merupakan ideologi pendidikan itu sendiri, di mana keluarga miskin berhak atas ilmu pengetahuan dan pendidikan yang murah dan bermutu. Prinsip ini adalah bentuk kritik terhadap pemerintah atas mahal biaya pendidikan, serta “menyindir” para orang tua yang lebih memilih kampus bermutu, meskipun biayanya mahal. Perlu dipahami, bahwa kampus murah pada dasarnya bukanlah kampus yang khusus diperuntukan bagi anak-anak miskin. Dengan kata lain, kampus harus terbuka untuk semua kalangan dari latar belakang yang berbeda, baik itu miskin ataupun kaya (*education for all*).

c. Partisipatif

Prinsip ini pada dasarnya, ingin membuang jauh-jauh citra kampus yang tidak bersahabat dengan kebutuhan masyarakat lokal. Selama ini pendidikan dirancang oleh intelektual “kota” yang tidak membumi, karena tidak mampu memahami kondisi nyata masyarakat yang sebenarnya. Karena itu, prinsip ini mengutamakan partisipasi dan komunikasi yang sehat antar pengelola pendidikan, dosen, mahasiswa, wali mahasiswa, masyarakat dalam merancang bangunan sistem pendidikan yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan.

d. Kurikulum berbasis kebutuhan

Sejatinya, kurikulum pendidikannya haruslah sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan masyarakat setempat.⁸ Kurikulum sebagai perangkat dan upaya pelaksanaan pendidikan nasional merupakan suatu kegiatan dan usaha-usaha pendidikan yang terorganisasi dan terintegrasi yang dilakukan oleh-oleh lembaga pendidikan yang terarah kepada tercapainya pendidikan nasional. Namun, pada kenyataannya, kurikulum pendidikan saat ini dinilai sebagian kalangan tidak lagi berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Kampus hendaklah berupaya untuk menciptakan kurikulum yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, artinya, kurikulum yang dirancang bertujuan untuk menjawab kebutuhan akan pengelolaan sekaligus penguatan daya dukung sumberdaya yang tersedia demi menjaga kelestarian serta memperbaiki kehidupan masyarakat setempat.

e. Kerjasama

Selama ini metodologi pendidikan yang dibangun di kampus-kampus terkesan dikotomik. Hubungan antara dosen dan mahasiswa, bak raja dengan pelayan, di mana dosen terkesan otoriter dalam mengajar dan mahasiswa dianggap “bodoh,” sehingga mahasiswa seolah hanya diberi pasokan ilmu semata, tanpa adanya interaksi yang optimal. Paradigma inilah yang perlu kita ciptakan dengan menerapkan prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama dalam pendidikan bertujuan untuk menghilangkan sekat ruang dan waktu antara dosen dan mahasiswa.

Dalam konteks ini, dosen dan mahasiswa adalah sebuah tim yang berproses secara partisipatif.

f. Evaluasi berpusat pada subyek didik

Pelaksanaan ujian di kampus selama ini lebih mengedepankan aspek kognitif merupakan sisi buram dunia pendidikan saat ini. Lebih dari itu, prinsip-prinsip evaluasi, yang mencakup tiga aspek. *Pertama*, prinsip kontinuitas (kesinambungan, terus menerus), di mana evaluasi dilakukan secara terus menerus mulai dari proses belajar-mengajar hingga tamat. *Kedua*, prinsip komprehensif (menyeluruh), di mana evaluasi mencakup berbagai aspek yang dapat menunjukkan perkembangan dan perubahan tingkah laku mahasiswa sebagai makhluk hidup yang dapat berubah karena ruang, waktu, dan keadaan. *Ketiga*, prinsip obyektivitas, di mana dalam melakukan evaluasi harus berlaku seobyektif mungkin dan harus didasarkan atas kenyataan yang sesungguhnya.⁹

g. Percaya diri

Pengakuan atas keberhasilan mahasiswa bukanlah ketika ia mampu mendapatkan selebar ijazah. Akan tetapi, pengakuan atas keberhasilan mahasiswa tergantung pada subyek pendidikan itu sendiri. Pengakuan akan datang dengan sendirinya manakala kapasitas (kompetensi) pribadi meningkat, dan bermanfaat bagi orang lain. Prinsip-prinsip inilah yang kemudian digunakan dalam proses pendidikan berbasis masyarakat, dengan tujuan mengatur bagaimana seharusnya posisi dosen dalam mengelola pendidikan, bagaimana menposisikan mahasiswa, bagaimana mengupayakan sarana-prasarana penunjang pendidikan, serta bagaimana mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan itu sendiri.

3. Pembelajaran dalam konstek pendidikan berbasis masyarakat

Kegiatan perkuliahan merupakan inti kegiatan pendidikan secara keseluruhan. Dalam prosesnya, kegiatan ini melibatkan interaksi individu yaitu dosen di satu pihak dan mahasiswa di pihak lain. Keduanya berinteraksi dalam suatu proses yang disebut proses belajar-mengajar. Tentunya untuk

⁸Muhammad Zein, *Asas dan Pengembangan Kurikulum*, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 2001), hal. 25.

⁹Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 45.

mewujudkan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien, maka perilaku yang terlibat dalam proses tersebut perlu didinamiskan secara baik.¹⁰

Dalam konsep pendidikan berbasis masyarakat ada beberapa hal yang perlu digambarkan dalam proses pendidikannya, sebagai berikut:

1. Kurikulum berbasis kebutuhan

Tak dapat dipungkiri, walaupun prinsip kurikulum yang digunakan berbasiskan kebutuhan, namun penggunaan kurikulum nasional masih diterapkan. Walaupun demikian, keberadaan kurikulum nasional, perlu dikritisi, sehingga menekankan pada kebutuhan masyarakat sekitar, yaitu: 1) Menekankan pada pilihan persoalan yang bebas; 2) Berpusat pada kegiatan belajar yang ditentukan bersama-sama; 3) Menekankan izin bagi setiap individu untuk menentukan pusat perhatian sendiri dalam belajar; 4) Kegiatan belajar ditentukan secara bersama-sama dan 5) Setiap mahasiswa mesti bebas untuk menentukan sifat maupun isi apa yang dipelajarinya sendiri.¹¹

Semua hal di atas, adalah upaya untuk memberikan tekanan dalam membangun basis pendidikan yang berorientasi komunitas. Dengan demikian, kepentingan pengetahuan harus dikembalikan pada realitas aslinya. Pengetahuan adalah abstraksi dari realitasnya, sehingga yang paling tepat dipelajari adalah belajar dalam realitas itu sendiri, karena dengan begitu pengetahuan mempunyai makna yang sebenarnya.

Dalam konteks ini, mahasiswa diberikan kebebasan untuk mencari sendiri apa yang ada dan yang perlu diadakan dalam masyarakatnya, dengan tetap menekankan bagaimana mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat memecahkan apa yang seharusnya menjadi problem hidupnya.¹² Di samping itu, ada beberapa kurikulum yang dikembangkan secara optimal seperti bahasa Inggris dan Arab. Bahasa Inggris dan Arab dikembangkan sesuai dengan habitatnya, di

mana bahasa tidak diberikan secara teori saja, tapi juga dipraktekkan sehari-hari. Di sini mahasiswa dibiasakan untuk berbicara bahasa setiap harinya dengan teman sebayanya.

2. Kedudukan dosen; sang pendidik

Menurut Freire sebagaimana yang dikutip oleh Fakih, dalam pendidikan terdapat tiga elemen fundamental yaitu: pendidik/fasilitator, mahasiswa dan realitas dunia. Hubungan pendidik dan mahasiswa dalam proses pendidikan layaknya seorang “partner” yang saling melengkapi. Artinya, pendidik dan mahasiswa memiliki kedudukan yang sama dalam proses pendidikan. Sehingga pendidik bukanlah “raja” yang bisa memerintah secara otoriter (struktur-formal) kepada mahasiswa. Melainkan hubungan yang dibangun antar keduanya (pendidik dan mahasiswa) sangatlah harmonis, komplementer dan saling berbagi bukan atas dasar struktur-formal, yang hanya akan melahirkan “pendidikan gaya bank” (*Banking concept of education*).¹³

Teori Fiere di atas menempatkan mahasiswa sebagai bejana kosong, di mana ia diberikan ilmu pengetahuan agar daripadanya kelak diharapkan suatu hasil lipat ganda. Jadi, mahasiswa adalah obyek investasi dan sumber deposito potensial. Depositor atau investornya adalah para dosen di kampus, sementara depositnya adalah ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada mahasiswa. Mahasiswa pun lantas diperlakukan sebagai “bejana kosong” yang akan diisi, sebagai sarana tabungan atau penanaman “modal ilmu pengetahuan” yang akan dipetik hasilnya kelak. Jadi, dosen adalah subyek aktif, sedang mahasiswa adalah obyek pasif yang penurut, dan diperlakukan tidak berbeda atau menjadi bagian dari realitas dunia yang diajarkan kepada mereka, sebagai obyek ilmu pengetahuan teoritis yang tidak berkesadaran. Pendidikan akhirnya, bersifat negatif di mana dosen memberi informasi

¹⁰Mohammad Surya, *Psikologi Pendidikan dan Pengajaran*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2009), hal. 47.

¹¹Lihat, Zein, *Asas ...* hal. 27.

¹²*Ibid.*, hal. 10.

¹³Mansour Faqih, dkk, *Pendidikan Populer Membangun Kesadaran Kritis*, (Yogyakarta: Insist, 2007), hal. 40-41; Bandingkan dengan Paulo Fiere, *Pendidikan Kaum Tertindas (Pedagogy of Oppressed)*, Penguin Books, 1978; edisi Indonesia diterbitkan oleh LP3ES, 1985).

yang harus ditelan oleh mahasiswa, yang wajib diingat dan dihafalkan. Secara sederhana Freire, menyusun daftar antagonis pendidikan “gaya bank” sebagai berikut: (1) Guru mengajar, murid belajar; (2) Guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa; (3) Guru berpikir, murid dipikirkan; (4) Guru bicara, murid mendengarkan; (5) Guru mengatur, murid mendengarkan; (6) Guru mengatur dan memilih memaksakan pilihannya, murid menuruti; (7) Guru bertindak, murid membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan guru; (8) Guru memilih apa yang akan diajarkan, murid menyesuaikan diri; (9) Guru mengacaukan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang profesionalismenya, dan mempertentangkannya dengan kebebasan murid-murid dan (10) Guru adalah subyek proses belajar, murid hanya obyeknya.¹⁴

Karena itu, dosen yang menjadi pusat segalanya, maka merupakan hal yang lumrah saja, jika mahasiswa kemudian mengidentifikasi diri seperti dosennya sebagai *prototipe* manusia ideal yang harus ditiru dan digugu, harus diteladani dalam semua hal. Freire menyebut pendidikan semacam ini menciptakan “nekrofilia” dan bukannya melahirkan “biofilia” Implikasinya, lebih jauh adalah bahwa pada saatnya nanti mahasiswa akan benar-benar menjadi diri mereka sendiri sebagai duplikasi dosen mereka dulu, dan pada saat itulah lahir lagi manusia-manusia penindas yang baru. Jika kemudian mereka menjadi dosen atau pendidik juga, maka daur penindasan pun segera dimulai lagi dalam dunia pendidikan, dan seterusnya. Sistem pendidikan, karena itu, menjadi sarana terbaik untuk memelihara keberlangsungan *status-quo* sepanjang masa, bukan menjadi kekuatan penggugah (*subversive force*) ke arah perubahan dan pembaharuan. Bagi Freire, sistem pendidikan sebaliknya justru harus menjadi kekuatan penyadar dan pembebas umat manusia.¹⁵ Sistem pendidikan saat ini seakan-akan telah

menjadikan mahasiswa sebagai manusia-manusia yang terasing dan tercerabut (*disinherited masses*) dari realitas dirinya sendiri dan realitas dunia sekitarnya, karena ia telah mendidik mereka *menjadi ada* dalam pengertian *menjadi seperti* yang berarti menjadi seperti orang lain, bukan *menjadi dirinya sendiri*.

Pendidikan gaya bank merupakan bentuk hubungan yang bisa melahirkan tekanan-tekanan terhadap mahasiswa itu sendiri. Tekanan-tekanan tersebut bisa berbentuk kata-kata maupun tindakan, seperti memberikan hukuman secara berlebihan terhadap mahasiswa. Tak ayal kondisi ini, tentunya berujung pada hilangnya pola hubungan dialogis dan *participatoris* dalam interaksi belajar mengajar. Celakanya, pola hubungan tersebut, sampai sekarang masih sering dipraktikkan diberbagai lembaga pendidikan, tak terkecuali di kampus.

Pola hubungan inilah yang seharusnya diterapkan dalam sebuah kampus, di mana hubungan pendidik bukan lagi atas dasar struktur-formal. Akan tetapi, berdasarkan hubungan *partnership* seperti yang pernah dikemukakan oleh Freire.¹⁶ Dalam hal ini, dosen diperankan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai sahabat yang memfasilitasi mahasiswa dalam proses pendidikan. Di sini fungsi pendidik hanya sebagai penggerak (dinamisator), fasilitator, dan pelayan agar potensi dan kreasi mahasiswa berkembang dengan optimal.

Suasana belajar yang kemudian diterapkan adalah menciptakan kelas yang tidak kaku dan tidak penuh intimidasi. Karena hal itu tidak akan menciptakan kelas yang dinamis dan kreatifitas. Kreatifitas dapat dihasilkan jika mahasiswa penuh percaya dan tanpa rasa takut, dan yang terpenting dosen selalu memberikan kepercayaan lebih terhadap mahasiswa.

3. Mahasiswa sebagai aktor yang bebas
Mahasiswa merupakan elemen penting lainnya dalam pendidikan, tanpa mahasiswa mustahil terjadi proses pendidikan di kelas. Bagi Maslow pendidikan harus memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk memilih, namun perlu diimbangi dengan mengajarkan sikap

¹⁴Lihat, Fiere, *Pendidikan Kaum ...* hal. 35; Bandingkan dengan Paulo Fiere, *Gerakan Kebudayaan untuk Kemerdekaan (Cultural Action for Freedom)*, (Penguin Books, 1977).

¹⁵James A. Coleman, *Education and the Political Development*, (Princeton, New Jersey, 1969), hal. 32.

¹⁶Fiere, *Pendidikan Kaum ...* hal. 36.

menghormati orang lain.¹⁷ Dalam hal ini, sejatinya mahasiswa harus diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi dan kreatifitas yang telah menjadi fitrahnya.

Dengan aktif bertindak dan berpikir sebagai pelaku, mahasiswa dapat dengan terlibat langsung dalam permasalahan yang nyata, dan dalam suasana yang dialogis. Pembebasan hanya bisa dilaksanakan dalam pengertian yang sesungguhnya jika seseorang (mahasiswa) memang benar-benar telah menyadari realitas dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Mahasiswa yang tidak menyadari realitas dirinya dan dunia sekitarnya, tidak akan pernah mampu mengenali apa yang sesungguhnya ia butuhkan, tidak akan pernah bisa mengungkapkan apa yang sesungguhnya ia ingin lakukan, tidak akan pernah dapat memahami apa yang sesungguhnya yang ingin ia capai. Jadi, mustahil memahami pada seseorang bahwa ia harus mampu, dan pada hakikatnya, memang mampu, memahami realitas dirinya dan dunia sekitarnya sebelum ia sendiri benar-benar sadar bahwa kemampuan itu adalah fitrah kemanusiaannya dan bahwa pemahaman itu sendiri adalah penting dan memang mungkin baginya.

Kebebasan bagi mahasiswa inilah yang diterapkan di kampus berbasis masyarakat, yakni memberikan penekanan pada mahasiswa sebagai aktor yang bebas. Dengan kata lain, tidak ada keharusan untuk menterjemahkan kebudayaan atau peradaban yang dominan untuk menjadi kebudayaan terjemahan yang dipaksa. Kondisi ini harus disadari bahwa setiap penterjemahan mengandung agenda yang menuntut kesamaan budaya yang ditiru dan hal ini tidak mungkin terjadi, apabila ada kultur yang lebih dahulu mengisi kesadarannya. Terlebih penterjemahan selalu dipandang kurang bagi budaya pemilik asli yang memiliki budaya tersebut.

Konsep pendidikan ini sangat menghargai keberadaan mahasiswa. Mahasiswa ditempatkan sebagai subyek yang paling berkepentingan dalam pendidikan.

¹⁷Frank G. Goble, *Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, Yogyakarta: Kanisius, 1987), hal. 73.

Mahasiswa diberi ruang dan waktu yang seluas-luasnya untuk bisa berimajinasi, berekspresi, bereksplorasi, dan mengenali potensinya. Mereka terus dimotivasi untuk mengembangkan potensinya, termasuk dalam menggali nilai-nilai moralitas dan nilai-nilai universal kehidupan.

Seharusnya mahasiswa diberi kepercayaan untuk merasa bangga dengan yang dimilikinya tanpa harus merasa terpaksa atau dipaksa sebagai bagian dari komunitas yang memperkaya hasanah kehidupannya selama ini, dan mahasiswa diupayakan untuk memaksimalkan sikap adaptif pada akhir seluruh proses pendidikan mereka. Di samping itu, mahasiswa dibiasakan mengemukakan pendapatnya secara langsung, baik kepada pendidik maupun teman terkait materi yang diterimanya. Hal itu dilakukan terus menerus dengan penuh percaya diri, tanpa merasa malu atau takut akan kesalahan. Mereka bebas bertanya apapun dan dengan siapapun di kampusnya. Dialog semacam inilah yang masih jarang kita temukan di kampus-kampus lain.

4. Metode pengajaran yang menyenangkan

Model ini merupakan pengembangan dari model pendidikan tradisional yang lebih banyak menekankan pada tanggungjawab individual dalam proses pendidikan. Menurut model ini, pendidikan dapat berlangsung tidak hanya menjadi tanggung jawab individual, akan tetapi menjadi tanggung jawab kolaboratif melalui proses kehidupan kelompok.¹⁸

Metode kolaboratif yang berasal dari dosen dan mahasiswa tersebut seakan menjadi karakteristik dari setiap metode yang dilakukan, sehingga proses pendidikan dilakukan dengan sinergi dan menyenangkan. Jadi, keduanya (dosen dan mahasiswa) saling belajar satu sama lain. Dalam proses ini, dosen mengajukan bahan untuk dipertimbangkan oleh mahasiswa dan pertimbangan sang dosen sendiri diuji kembali setelah dipertemukan dengan pertimbangan mahasiswa, dan sebaliknya. Hubungan keduanya pun menjadi hubungan subyek - subyek, bukan subyek obyek. Obyek mereka adalah realitas, sehingga terciptalah suasana dialogis yang bersifat intern subyek untuk memahami suatu obyek secara

¹⁸Surya, *Psikologi Pendidikan ...* hal. 57.

bersama. Konsekuensi logisnya, ketika kebersamaan muncul, maka di saat itulah kesenangan dalam belajar akan muncul.

5. Sarana pendidikan sederhana

Kampus berkualitas selalu identik dengan sarana-prasarana yang mewah seperti gedung yang dikelilingi dengan pagar yang tinggi dan ruangan kelas ber-AC. Sebaliknya, konsep pendidikan ini jauh dari kesan kampus pada umumnya, kampus ini tidak memiliki gedung kampus yang berpagar ataupun kelas yang ber-AC. Kampus model ini hanya dapat diterapkan di mana saja dan tidak perlu dengan biaya yang mahal. Namun demikian, bukan berarti kampus seperti ini tidak memiliki sarana penunjang. Walaupun berlokasi di daerah pinggiran misalnya, mahasiswanya dapat mengakses internet. Bagi mereka internet bukan lagi barang yang langka, tapi sudah menjadi ‘makanan’ empuk sehari-hari. Keberadaan internet yang bisa diakses selama 24 jam membuat mahasiswa dapat mengakses segala ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kampus seperti ini sebenarnya harapan masa depan kita dengan modal yang murah yang ditunjang dengan fasilitas yang memadai.

Keberadaan jaringan internet di sebuah kampus sangat urgen untuk diterapkan. Dengan hadirnya internet di sebuah kampus diharapkan, setidaknya terdapat tiga dampak positif internet untuk mahasiswa. *Pertama*, akses ke sumber informasi, di mana mahasiswa dapat mengakses sumber-sumber informasi tanpa batas dan secara langsung, seperti literatur, buku umum, majalah, referensi dan ensiklopedia. *Kedua*, melatih mahasiswa untuk berbahasa asing, khususnya bahasa Arab dan Inggris. Tak terbantahkan walaupun ada situs yang berbahasa Indonesia, namun bahasa Inggris merupakan modal utama untuk mencari sumber informasi di internet. Logikanya, mau tidak mau mahasiswa harus dapat berbahasa Arab dan Inggris. Hal ini tentunya bisa dijadikan motivasi bagi mahasiswa untuk selalu memperbaiki penguasaan dan pemahaman

bahasa Arab dan Inggrisnya. *Ketiga*, terciptanya dialog antar para mahasiswa di seluruh dunia. Mengingat internet bisa dijadikan sebagai salah satu media bagi mahasiswa untuk dapat sekedar bertukar pikiran, berbagi pengalaman antar sesama melalui forum-forum yang ada di internet.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana-prasarana pelajaran di sebuah kampus “Harapan” diletakkan sesuai dengan fungsinya. Sarana-prasarana pendidikannya dipilih lebih karena kebutuhan pokok, bukan karena gengsi semata. Gedung kampus yang mewah hanyalah bungkus yang nampak dari luar bagus, tapi belum tentu di dalamnya bagus. Artinya, kampus yang memiliki gedung yang bertingkat dan memiliki ruangan ber-AC belum tentu menghasilkan *out-put* yang berkualitas.

KESIMPULAN

Dari uraian kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang bermutu tidaklah selalu mahal. Dengan terciptanya pendidikan yang bermutu dan murah, maka di sinilah peran kampus memberikan pesan ganda, bahwa sesungguhnya kampus berkualitas tidaklah harus mahal. Selama ini, stigma yang terbangun di masyarakat, bahwa pendidikan yang berkualitas selalu identik dengan tingginya biaya pendidikan, semakin berkualitas, maka semakin banyak biaya yang harus dibayar. Pandangan inilah yang dicoba dihilangkan.

SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil kajian di atas, dapat disarankan bahwa konsep pendidikan berbasis masyarakat ini bisa dijadikan sebagai alternatif pendidikan tinggi dalam memberdayakan masyarakat lokal. Sudah saatnya kaidah-kaidah lokal diberdayakan, diolah dan dimanfaatkan melalui dunia pendidikan.

DAFTAR BACAAN

- Arikunto, Suharsimi. (1999). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta.
- Coleman, A. James. (1969). *Education and the Political Development*, Princeton, New Jersey.
- Danim, Sudarman. (2012). *Manajemen Kampus*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Faqih, Mansour dkk. (2007). *Pendidikan Populer Membangun Kesadaran Kritis*, Yogyakarta: Insist.
- Fiere, Paulo. (1985). *Pendidikan Kaum Tertindas (Pedagogy of Opressed)*, Penguin Books, 1978; edisi Indonesia diterbitkan oleh LP3ES.
- Fiere, Paulo. (1977). *Gerakan Kebudayaan untuk Kemerdekaan (Cultural Action for Freedom)*, Penguin Books.
- Goble, G. Frank. (1987). *Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, Yogyakarta: Kanisius.
- Mastuhu. (20014). *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, Yogyakarta: Safaria Insania Press.
- Surya, Mohammad. (2009). *Psikologi Pendidikan dan Pengajaran*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Penjabarannya*, Yogyakarta: Media Wacana Press.
- Zein, Muhammad. (2001), *Asas dan Pengembangan Kurikulum*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset.
- Zubaedi. (2006). *Pendidikan Berbasis Masyarakat; Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.